

1. MUNICIPAL FINANCE.
2. INCOME TAX, MUNICIPAL

**PERAN BAGI HASIL PAJAK-PAJAK PUSAT SEBAGAI POTENSI
SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGHADAPI
OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

GATOT INDRA LAKSMANA
No. Pokok : 049721606-E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

KK
A202/01
hak
p

SKRIPSI


**PERAN BAGI HASIL PAJAK-PAJAK PUSAT SEBAGAI POTENSI
SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGHADAPI
OTONOMI DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN)**

**DIAJUKAN OLEH
GATOT INDRA LAKSMANA
No. Pokok. 049721606-E**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK

DOSEN PEMBIMBING,


**Dra. ELIA MUSTIKASARI, M.Si., Ak.
NIP. 131 943 804**

Tanggal 23/07/01 .

KETUA PROGRAM STUDI


**Dr. ARSONO LAKSMANA, SE., Ak.
NIP. 130 783 542**

Tanggal 23/07/01

ABSTRAKSI

Atas keinginan sejumlah daerah yang minta diberikan keleluasaan untuk mengelola daerahnya sendiri dan tidak lagi menggantungkan diri dari pemerintah pusat, telah direspon pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, masing-masing tentang Pemerintahan Daerah, dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kinerja pemerintahan daerah selama ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Namun dengan adanya undang-undang baru tersebut, keleluasaan daerah dalam mengatur keuangan daerah semakin diperbesar. Namun tidak selamanya berarti bahwa perimbangan keuangan tersebut otomatis dapat membawa kemakmuran kepada daerah-daerah yang bersangkutan. Dapat terjadi ketimpangan fiskal antar daerah apabila hal tersebut tidak diiringi dengan kemampuan daerah dalam menggali potensi asli daerah. Ketimpangan tersebut diakibatkan karena kemampuan daerah dalam menghasilkan dana bagi kesinambungan pembangunan daerah adalah tidak sama.

Dalam menyikapi keadaan tersebut, di daerah Kabupaten Pasuruan juga telah dimulai pemikiran untuk menggali potensi sumber dana alternatif, yaitu dari bagi hasil pajak-pajak pusat yang dipungut dan dihasilkan di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus, penulis ingin memberikan gambaran lebih jelas atas kondisi yang ada di Kabupaten Pasuruan dalam hubungannya antara penerimaan asli daerah dengan penerimaan pajak-pajak pusat di daerah.

Dilihat dari penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan berdasarkan APBD tahun 1999/2000, dapat digolongkan ke dalam 5 bagian besar yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain pendapatan. Apabila mengikuti peraturan sebelum diundangkan UU No. 25/199, pada tahun 2001 diperkirakan menyumbang pemasukan sebesar Rp. 31.452.386.564,-. Namun apabila dapat diberikan tambahan dari bagi hasil pajak pusat yang dikelola oleh kantor pajak setempat, maka akan dapat menghasilkan Rp. 51.464.020.516,- atau sebesar 64,9%. Penambahan jumlah pemasukan yang sangat berarti inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk meminta bagi hasil pajak pusat walau hanya sekitar 10%.

Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa sumber dana dari bagi hasil pajak pusat adalah cara yang tepat dan sesuai dalam membantu daerah dalam meningkatkan penerimaannya. Sehingga kiranya dapat diusulkan bahwa bagi hasil pajak dapat dijadikan salah satu alternatif penerimaan daerah dalam rangka sumber dana pembangunan daerah.